

**PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGUPAYAKAN PENINGKATAN
KAPASITAS HAKIM DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**



**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Penyusunan Skripsi Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

Sulthan Bin Tahir

NPM : 1421020033

Jurusan : Siyasah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGUPAYAKAN PENINGKATAN
KAPASITAS HAKIM DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjan Hukum (S.H.)



Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin. M.Ag.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos. M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018**

ABSTRAK

Dalam konteks untuk mendorong lahirnya hakim-hakim sesuai tuntutan KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim), maka kehadiran undang-undang nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khususnya ketentuan pasal 20 ayat (2) telah memberi ruang dan peluang yang luas bagi Komisi Yudisial untuk makin fokus dan berkontribusi maksimal dalam mewujudkannya melalui tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim

Rumusan masalah didalam skripsi ini adalah mengenai tentang bagaimana Peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim dan bagaimana analisis siyasah tentang Peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim. Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar Peranan Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim dan analisis Fiqh siyasah terhadap peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, jurnal, yang sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan secara objektif materi yang diteliti. Analitik dipergunakan untuk mendapatkan dan mengetahui implikasi dari peranan komisi yudisial.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim sangatlah penting dalam meningkatkan integritas para hakim. Didalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa "Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim". Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah melakukan peningkatan kapasitas hakim melalui perogramnya seperti pendidikan calon hakim, program hakim berkelanjutan, beasiswa sekolah, dan diklat kekhususan atau sertifikasi bagi tenaga teknis pengadilan, dan beberapa seminar untuk para hakim. Dalam fiqh siyasah kekuasaan dalam upaya peningkatan kepasitas hakim dipegang oleh *as-sulthah al-tasyiri'ah* yang sebagai lembaga memegang wewenang dalam membentuk Undang-Undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist, dan melalui para Ijtima para Mujtahidin dan para Ahli fatwa.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

... Let. Kol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : **Sulthan Bin Tahir**

NPM : **1421020033**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul : **Peranan Komisi Yudisial Dalam Meningkatkan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag

NIP.195707051989031001

Eko Hidayat, S.Sos., M.H

NIP.197512302003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Drs. Susiadi A.S., M. Sos. I

NIP.1958081719930



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Peran Komisi Yudisial Terhadap Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah** oleh **Sulthan Bin Tahir**, NPM.1421020033, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Selasa, 17 Juli 2018

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua sidang : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

DEKAN



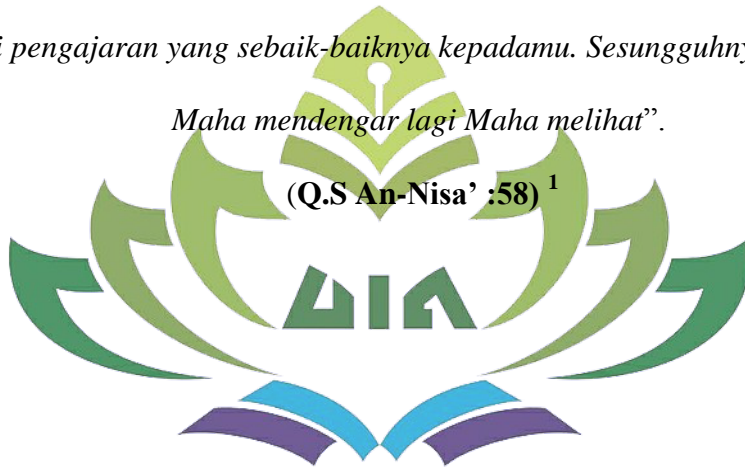
Dr. Moh. Syah S. Ag., M. Ag
NIP.197009011997031002

Motto

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisa’ :58)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung:CV Penerbit Dipenogoro, 2015), hlm. 88

PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan Syafaatnya. Ucapan terima kasih ku kupersembahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda H. Tahir dan Ibundaku Hj. Wahida, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing Penulis, dengan penuh kasih dan sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada keluarga ku yang dimanapun berada, terima kasih atas doa dan support yang telah kalian berikan.
3. Sahabat-sahabat perjuanganku di UIN Raden Intan terutama yang berada dikelas Siyasah B,Yan, Rendi, Faisal, Alba, Alfiyan, Teguh, Wulan, Dewi, Fitri, dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
4. Sahabat-Sahabatku diPMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).
5. Sahabat-sahabat Brudul Squad.
6. Sahabatku Mahesa, Bhakti, Syarif, bang Dian, dan lainnya.
7. Perempuan sekaligus Kekasihku yang selalu ada disetiap saat yaitu Yessy Purnamasari.
8. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

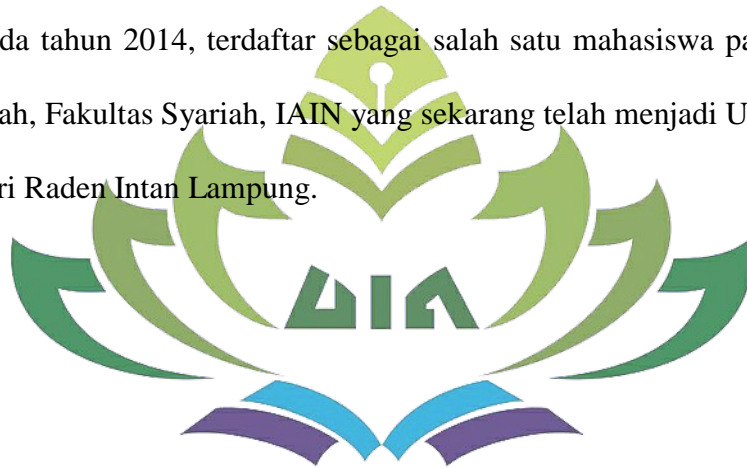
RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sulthan Bin Tahir, dilahirkan di Malaysia pada tanggal 10 April 1996, anak pertama dan tunggal dari pasangan H. Tahir dan Hj. Wahida.

Untuk pertama kalinya menyelesaikan pendidikan di:

1. SDN 024 Reteh Indra Giri Hilir Riau
2. Min Panjang, Lulus pada tahun 2008
3. Mts N 1 Tanjung Karang, Lulus pada tahun 2011
4. Man 2 Tanjung Karang, Lulus Pada Tahun 2014

Pada tahun 2014, terdaftar sebagai salah satu mahasiswa pada program S1 Siyasa, Fakultas Syariah, IAIN yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu, pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini yang berjudul “PERANAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM “ dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta dalam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafa'atnya dihari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan waktu yang tersedia tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. K.H. Khairudin, M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Haryanto, M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan Mahasiswa.
3. Bapak Drs. Susiadi AS., M.Kom.I. selaku ketua Program Studi Siyasa

4. Bapak H. Bunyana Sholihin., M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Eko Hidayat., S.Sos., M.H. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta Guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
 6. Bapak dan Ibu staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
 7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah angkatan 2014
 8. Teman-teman Kelompok KKN 77 (Kuliah Kerja Nyata) Tahun 2017 Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
 9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan. Untuk itu kepada pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapa kecilnya karya tulis ini (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, November 2018

Penulis

Sulthan Bin Tahir

NPM. 1421020033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran dan Peranan Komisi Yudisial.....	11
B. Peningkatan Kapasitas Hakim	13
C. Fiqh Siyasah	34

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Komisi Yudisial.....	50
B. Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Komisi Yudisial.....	71
C. Peran Komisi Yudisial Terhadap Peningkatan Kapasitas Hakim.....	79

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Komisi Yudisial dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim.....	86
B. Peranan Komisi Yudisial dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Perspektif Fiqih Siyasah.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Peranan Komisi Yudisial dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim Dilihat dari Fiqh Siyasah”. Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul dan penilitan ini, maka peneliti akan mengaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. **Peranan** adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.¹
2. **Komisi Yudisal** adalah suatu lembaga negara yang besifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.²
3. **Peningkatan** adalah proses, cara, pembuatan, meningkatkan, (usaha kegiatan dan sebagainya).³
4. **Kapasitas** adalah ruang yang tersedia, daya tampung, daya serap dan sebagainya.⁴
5. **Hakim** adalah seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan mengutus (mengadili) satu perkara.⁵

¹ Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm. 1011

² Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004

³ *Ibid*, hlm, 952

⁴ *Ibid*, hlm, 953

⁵ Rahmat trijono, *kamus hukum*, (Jakarta : pustaka kenang, 2016) hlm. 73

6. **Fiqh Siyasah** adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. objektif

Bahwa hakim merupakan tonggak hukum dari sebuah perkara hukum, hakim perlu diawasi dalam setiap perilaku maupun putusannya. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan hakim mengabaikan nilai keadilan.

2. subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengatuhan yang peneliti pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penilitan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam rana kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali baru, sejarah mencatat dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

⁶ Munawir Sajali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI press, 1991), hlm 22.

Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman. Namun, dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman⁷

Gagasan tersebut mengalami reinkarnasi, dan kali ini memperoleh rekomendasi yang cukup ketika UU nomor 35 tahun 1999 adalah perintah bahwa untuk meningkatkan *check and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat⁸.

Hal lain yang menjadi awal bagi gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh nilai peradilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia sedikit menurun. Dengan keadaan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan berlangsung, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap peradilan yang berorientasi pada masyarakat dalam mencari

⁷ Muh. Busyro Muqoddas dkk, *Laporan akhir pimpinan dan anggota komisi yudisial periode 2005-2010*, hlm, 7.

⁸ *Ibid.* hlm, 10

keadilan dan diperlakukan cara adil dimata hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa penyalahgunaan wewenang dalam peradilan disebabkan oleh banyak faktor, terutama dalam kurang efektifnya peningkatan kapasitas hakim sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas external didasarkan pada lemahnya peningkatan dan pengawas internal terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ada pada saat itu kalangan pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah menganggap perlu dibentuk Komisi Yudisial. Komisi ini nantinya diharapkan dapat memainkan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya rekrutmen hakim agung dan pengawasan terhadap hakim.

Menurut Jimly Ashshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat diluar struktural resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.⁹

Sebagai bagian dari upaya reformasi bidang hukum, pasal 24B Undang-Undang Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *check and balance* dalam penyelenggaraan kekuasaan

⁹ Jimly Asshiddiqie, "Kata Pengantar" dalam buku A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm 93

kehakiman, menurut ketentuan pasal ini, Komisi Yudisial mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan hakim dan tugas lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.¹⁰

Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan kehakiman sudah seharusnya dapat berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas hakim. Membuat Undang-Undang memandang penting keterlibatan Komisi Yudisial dalam peningkatan kapasitas hakim, sehingga memberikan tugas kepada Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas hakim melalui perubahan Undang-Undang.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim” berlandaskan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengupayakan peningkatan kapasitas hakim secara terus menerus dan berkesinambungan melalui programnya, yaitu seperti Program Pendidikan Calon Hakim (PPC), Program Pendidikan hakim Berkelanjutan (CJE), beasiswa sekolah dan diklat kekhususan

¹⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.126

atau sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan, menyelenggarakan pelatihan KEPPH, pelatihan tematik, pelatihan khusus, menyelenggarakan Form yudisial, menyediakan bahan bacaan terhadap hakim, dan menyediakan situs hakim.¹¹

Tugas Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga pemerintahan yaitu menegakkan kehormatan hakim, dan menjaga perilaku hakim dari perbuatan dilarang agama dan dilarang juga oleh Undang-Undang.

Hal ini sesuai dengan pandangan hukum Islam peningkatan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi dan memproses cara yang salah membenarkan yang hak.

Sesuai dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah yang secara leksikal berarti “tenang dan tidak takut”.

¹¹Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas Hakim?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas Hakim?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas Hakim
 - b. Untuk menganalisis Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas Hakim
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang kehakiman.
 - b. Secara praktis penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama bagi Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap hakim serta untuk memenuhi syarat akademik.

F. Metode Penilitan

1. Jenis data dan sumber data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹³ Dan deskriptif-analitis, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁴

2. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber bahan hukum premier

Sumber yang diperoleh penelitian ini secara langsung yang berasal dari Al-Quran, Hadist, dan pendapat para ahli, dan Undang-Undang Dasar, beserta

¹² Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), hlm, 38.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, 1985), hlm, 15.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 126

Undang-Undang yang berhubungan dengan kajian tentang pengawasan hakim oleh komisi yudisial dalam persfeksi hukum Islam.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku seperti penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁵

Bahan hukum sekunder diperoleh oleh refrensi, buku-buku, jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia dipergustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengelolaan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

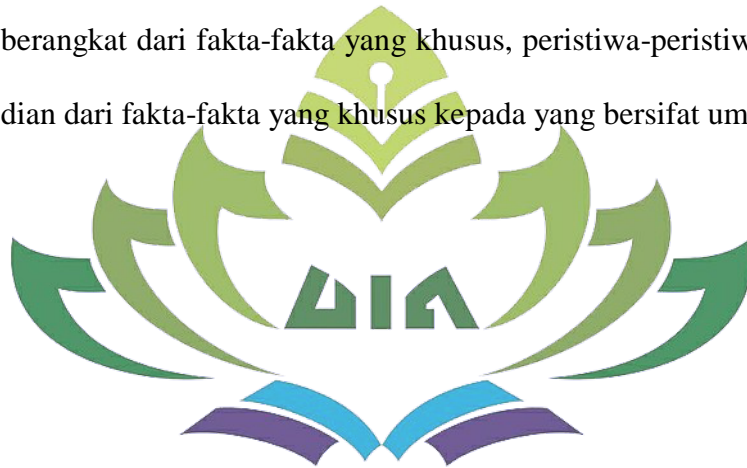
- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-quran dan hadist, atau buku-buku literature lainnya yang relevan dengan dengan penilitian.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hlm, 30

- c. Sistematika data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif adalah secara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus, dan secara induktif adalah metode yang merupakan kebalikan dari metode deduktif yaitu secara pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus kepada yang bersifat umum.



¹⁶*ibid*, hlm. 107.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran dan Peranan Komisi Yudisial

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam perannya, pernah juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹⁷ Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peran dan peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peran lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Unsur-unsur peranan adalah :¹⁸

1. Aspek dinamis dan kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang

Sementara peranan itu diatur juga oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

¹⁷ Soejono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 210

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 211

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi suatu struktur sosial masyarakat.¹⁹

Dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, pertama, komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional. Kedua, Komisi Yudisial diberi kewenangan menjaga dan menegakkan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutus perkara secara mandiri. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Komisi Yudisial untuk bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.²⁰

Indonesia memiliki peran strategis yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah : *Pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Peran tersebut dilakukan untuk menghindari kentalnya kepentingan politik atau legislatif dalam rekrutmen hakim agung.

¹⁹ *Ibid.* hlm, 215

²⁰ Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedua, peran lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal itu dilakukan dengan pengawasan eksternal yang sistematis dan intensif oleh lembaga independen terhadap lembaga peradilan dengan partisipasi masyarakat yang luas.²¹

Sebaliknya Komisi Yudisial didalam menjalankan peranannya diberi kewenangan untuk dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 24 UU No 22, 2004).

Peranan KY disini ialah sebagai lembaga pengawas kode etik hakim atau lembaga penegak kode etik hakim bukan sebagai lembaga pengawas peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman itu bersifat bebas dan merdeka jadi KY tidak dapat mengawasi sampai ke ranah teknis yustisialnya hal ini sesuai dengan pasal 22 ayat (3) UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial²². Jadi KY bertugas mengawasi para pelaksanaan kode etik dan perilaku menyimpang dari para hakim dari standart kode etik sebelum pelanggaran kode etik itu berkembang menjadi pelanggaran hukum sehingga terciptanya system peradilan yang baik tanpa adanya unsur *judicial corruption*.

B. Peningkatan Kapasitas Hakim

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan

²¹ *Op.cit.* Sirajudin dan Zulkarnaen..... hlm 73.

²² pasal 22 ayat (3) UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).²³ Peran besar hakim tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kekuasaan Kehakiman berikut dengan hakimnya diatur dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman yakni dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, dan Pasal 25. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang dimaksud dengan hakim adalah:

“Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.

Status hakim sebagai pejabat negara pada awalnya diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Penyelenggara Negara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), yang secara eksplisit menyatakan sebagai berikut, “*Penyelenggara Negara adalah Pejabat*

²³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 32.

Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya status hakim menjadi pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), yang menyatakan bahwa, “Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.” Selanjutnya yang termasuk pejabat negara dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UU tersebut, bahwa Pejabat Negara yaitu salah satunya terdiri atas, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan”. Status hakim sebagai pejabat negara ditegaskan lagi dalam Pasal 2 UU Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa salah satu penyelenggara negara adalah hakim.

Obyek pengawasan terhadap hakim cukup beragam, mulai dari aspek kemampuan teknis-yudisial (misalnya kemampuan menangani dan memutus perkara), aspek kerja dan administrasi perkara (misalnya efisiensi dalam menjalankan tugas, tertib administrasi, dan keuangan perkara), dan aspek perilaku hakim. Untuk membedakan kapan suatu proses pengawasan (dan penjatuhan

sanksi) dilakukan terhadap aspek teknis-yudisial, secara sederhana dapat dijelaskan dari hal-hal (bukti-bukti) yang dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran. Dianggap masuk ke ranah aspek teknis-yudisial jika bukti yang dijadikan dasar penentuan ada tidaknya pelanggaran adalah dokumen-dokumen yang dibuat hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk putusan pengadilan. Jika bukti yang dijadikan dasar penentuan ada/tidaknya pelanggaran adalah keterangan saksi-saksi, rekaman sidang pengadilan, pernyataan hakim di media massa atau dokumen yang dibuat di luar fungsi yudisial, maka hal ini masuk ranah perilaku²⁴

Kedudukan hakim sebagai pejabat negara juga dinyatakan dalam Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” Kemudian dalam perkembangannya status hakim ini juga kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 huruf e UU ASN yang menyatakan bahwa Pejabat Negara yaitu “Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc”. Perlu menjadi catatan dalam perkembangan terbaru ini adalah UU ASN mengeluarkan hakim ad hoc dari pengertian “hakim” yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Hal ini tentu dapat

²⁴ Bertin, “ Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap perilaku Hakim di hubungan dengan indenpendsi hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 1, (2013)

menjadi potensi masalah di kemudian hari mengingat pengertian “hakim” dalam UU Kekuasaan Kehakiman juga melingkupi hakim ad hoc.²⁵

Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUUXII/2014 yang dibacakan pada tanggal 20 April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan konsep bahwa hakim ad hoc bukanlah termasuk dalam pengertian hakim yang dikategorikan sebagai pejabat negara. MK berpendapat bahwa pengangkatan hakim ad hoc dilakukan melalui serangkaian proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya. Selain itu, tujuan awal dibentuknya hakim ad hoc adalah untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada. Hakim ad hoc merupakan hakim nonkarier yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus. Hakim ad hoc dapat memberi dampak positif ketika hakim ad hoc bersama hakim karier menangani sebuah perkara sehingga dalam putusan tersebut MK menilai bahwa Pasal 122 huruf e UU ASN tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penentuan hakim ad hoc sebagai pejabat negara merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian penentuan

²⁵ Taufiqurrohman Syahuri, Hakim Pasca UU Aparatur Sipil Negara, Notulensi Hasil Diskusi yang Diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bersama Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), 25 Januari 2014.

kualifikasi pejabat negara yang dikecualikan untuk hakim ad hoc sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.²⁶

Pemberian status “pejabat negara” pada jabatan hakim, dari sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), didasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan di bidang yudikatif dan bukan di bidang eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu. Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “The International Commission of Jurist” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).²⁷

Salah satu konsekuensi logis dari penetapan status tersebut adalah proses rekrutmen dan pengangkatan hakim tidak lagi mengikuti pola rekrutmen bagi PNS. Berdasarkan uraian tersebut, dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Perubahan Kedua UU Peradilan Umum) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

²⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUUXII/2014, Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 April 2015, hlm. 111-112

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 103

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Perubahan Kedua UU Peradilan Agama) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); dan
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Perubahan Kedua UU PTUN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079),

Telah diatur mengenai proses seleksi hakim pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut bahwa proses seleksi dilakukan bersama oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA), yang selanjutnya diatur bersama oleh KY dan MA. Seleksi pengangkatan hakim tersebut kemudian diwujudkan dalam peraturan bersama MA dan KY Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Peraturan ini mengatur metode seleksi hakim dan formula sistem untuk seleksi hakim yang disusun untuk mengatasi kekosongan hukum bahwa proses seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama oleh MA dan KY.

Adapun dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XII/2015 yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2015, MK membatalkan norma bahwa seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama oleh MA dan KY. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan

frasa “dan Komisi Yudisial” UU Perubahan Kedua UU Peradilan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalimat utuh dari Pasal 14A ayat (2) selengkapnya menyatakan bahwa, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung” dan ayat (3) menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.” Hal yang sama juga berlaku untuk Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) UU Perubahan Kedua UU Peradilan Agama yang dalam amar putusan tersebut menyatakan “*Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung*” dan “*Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung.*” Begitu juga untuk Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Perubahan Kedua UU PTUN. MK dalam putusan tersebut berpendapat bahwa walaupun dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan MA dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi ayat (2) dari Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa ketiga undang-undang tersebut berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah MA. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut MK seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan MA dan bukan kewenangan KY.²⁸

²⁸ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUUXII/2015, Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Permasalahan selanjutnya adalah sistem peradilan yang “satu atap” dengan manajemen Hakim militer. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa manajemen hakim telah beralih dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, hal ini menjadi sulit dilakukan bagi Hakim militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) dinyatakan bahwa untuk menduduki jabatan hakim pada tingkat tertentu harus memenuhi jenjang kepangkatan militer tertentu, yang mana urusan tersebut merupakan domain dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). MA tidak dapat mempromosikan seorang Hakim militer dari suatu jabatan tertentu ke jabatan lainnya, karena MA tidak dapat menaikkan kepangkatan militer.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur mengenai jabatan hakim (UU Jabatan Hakim) yang lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai proses pengangkatan, status kepegawaian, jenjang karier/kepangkatan, hak-hak keuangan, fasilitas, pembinaan, pengawasan hingga pemberhentian hakim. UU Jabatan Hakim ini diperlukan untuk menjamin bahwa hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman benar-benar mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan pemerintah. Saat ini beberapa aspek terkait jabatan hakim seperti pengangkatan hakim, hak keuangan, jenjang karier/kepangkatan, dan fasilitas masih mengikuti standar aturan bagi PNS.

Pembentukan RUU Jabatan Hakim sebenarnya secara tidak langsung merupakan amanat Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 April 2015, hlm. 120-123

²⁹ Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 April 2015, hlm. 120-123. 8 Gaji Hakim dan Gaji PNS, dimuat dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/04/gaji-hakim-dan-gaji-pns/>, diunduh pada 11 desember 2018, Pukul 18.00 WIB.

bahwa “hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” RUU Jabatan Hakim juga harus mengatur secara jelas batasan hakim yang diatur dalam undang-undang ini, apakah hanya hakim pengadilan tingkat pertama saja, atau juga mencakup hakim agung dan hakim konstitusi. Sampai saat ini hanya hakim agung dan hakim konstitusi yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai rekrutmen hingga pensiun, sebaliknya hakim-hakim di luar hakim agung dan hakim konstitusi masih belum ada pengaturan yang jelas.³⁰

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Ketika menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pada amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kedudukan hakim tercantum dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1) yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

³⁰ “Pengertian Hakim” (On-Line), tersedia di <file:///C:/Users/Notebook/Downloads/na-ruu-jabatan-hakim-16-april-2016.pdf> (11 Desember 2018)

Pada Pasal 25 Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakim dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal tersebut untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat bersungguh-sungguh dan memiliki independensi, merdeka, dan terhindar dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.

Ruang lingkup tugas hakim tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti. Secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat peradilan yang terdiri dari hakim, panitera, jurusita, dan tenaga non hakim lainnya, serta sarana hukum baik hukum materiil maupun formil. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Pada hakikatnya tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas

dan kewajiban hakim dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.³¹

Berdasarkan tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
3. Menjalankan tugas dan fungsi. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
5. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
6. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 65.

7. Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum (Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
8. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
9. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadili (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
10. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lainnya (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
11. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009)
12. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
13. Pada sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009)³².

Tugas hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Mengkonstantir, yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa secara konkret. Hakim mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di ruang persidangan. Syaratnya yaitu peristiwa konkret tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret benar-benar terjadi, sehingga mengkonstantir berarti menetapkan peristiwa atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
2. Mengkualifisir, yaitu menetapkan dan merumuskan peristiwa hukum. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa, sehingga mengkualifisir menemukan hukum terhadap suatu peristiwa yang telah dikonstantir dengan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Mengkualifisir dilakukan dengan cara mengarahkan peristiwa kepada aturan hukum atau undang-undang, kemudian diterapkan pada peristiwa tersebut. Undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa agar dapat mencakup semua peristiwa.
3. Mengkonstituir, yaitu hakim menetapkan hukum dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Hakim mengambil kesimpulan dari premise mayor (pengaturan hukum) dan premise minor (peristiwa). Hakim harus

³² Wildan Suyuthi Mustofa, "*Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim*", hlm. 107

memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat ketika memberikan putusan.

Pasal 159 ayat (4) HIR atau Pasal 186 ayat (4) R.Bg, menyebutkan bahwa pengunduran (penundaan) tidak boleh diberikan atas permintaan kedua belah pihak dan tidak boleh diperintahkan pengadilan negeri karena jabatannya, melainkan dalam hal yang teramat perlu.

Pada prakteknya terkadang sikap hakim terlalu lunak terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atau kuasa hukumnya.³³ Adapun beberapa hal yang sering menyebabkan tertundanya sidang, antara lain:

1. Para pihak atau kuasa hukum yang tidak hadir secara bergantian.
2. Para pihak atau kuasa hukum selalu meminta agar sidang ditunda.
3. Saksi yang tidak hadir walaupun sudah dipanggil.

Mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan peran hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan agar dapat tercapai peradilan yang cepat (*speedy administration of justice*). Hakim dengan tegas harus menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak jika hal tersebut tidak perlu dilakukan. Berlarutlarut atau tertundanya persidangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan.

Etika Profesi Hakim tercantum dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor

³³ *Ibid.*, Hlm 108

047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut :

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya. Berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum maka tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang sehingga, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan memikul tanggung jawab menegakkan hukum harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

2. Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan batil sehingga, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan

3. Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, keagamaan, kebiasaankebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugas serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut.

7. Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri hakim akan mendorong dan membentuk

pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan.

9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan

dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien³⁴.

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normative telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain :

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004).
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat 1).
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat – nasehat tentang soal – soal hukum kepada lembaga Negara lain apabila diminta (pasal 25).
5. Hakim wajib mengali, mengikuti dan memehani nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).

³⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm 7-20

UUD 1945 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sampai detik ini telah mengalami empat kali perubahan untuk lebih memunculkan *check and balances* secara lebih proporsional.

Perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum melalui *check and balances* antara lembaga Negara dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif lebih menonjol setelah dibentuknya beberapa lembaga Negara baru melalui perubahan UUD 1945 tersebut, salah satu lembaga baru yang dibentuk melalui amandemen UUD 1945 adalah Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) adalah :

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Yang dimaksud Komisi Yudisial dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. “ Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau kekuasaan lainnya.”³⁵

³⁵ Pasal 1 ayat (1) dan 2 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Dari ketentuan tersebut maka Komisi Yudisial adalah Lembaga yang mandiri atau independen. Secara epistemologi independen berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri. Tidak adanya campur tangan dengan kekuasaan lain atau ketidak bergantungan suatu pihak dengan pihak yang lainnya seperti eksekutif, ataupun legislatif.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 ayat (2) tahun 2011 disebutkan juga bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Ketentuan ini bersifat imperatif menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial yang selain tugas-tugas melakukan pengawasan perilaku hakim. Berdasarkan amanah undang-undang Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas Hakim. Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang diarahkan untuk melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.³⁶

Peningkatan kapasitas hakim merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan hakim yang mempunyai kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH. Dari sudut pandang psikologi, pendidikan, kapasitas pengetahuan hukum berkaitan dengan ranah kognitif dan psikometrik hakim, meskipun dalam tataran tertentu tidak dapat dipisahkan dari ranah afektif. Menurut bloom, ranah kognitif secara bertingkat terdiri dari aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi, sementara ranah psikometrik, terdiri dari aspek perspsi, kesiapan, respon

³⁶ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 ayat (2) tahun 2011

terpimpin mekanisme, respon nyata yang kompleks, penyesuaian, dan organisasi. Sedangkan ranah efektif meliputi ranah penerimaan, penanganan, penghargaan, pengorganisasian, dan pengkarakterisasian. Merujuk pada peningkatan kapasitas hakim hakim yang dilakukan Komisi Yudisial dapat menyentuh ranah afektif, kognitif, maupun psikometrik.³⁷

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Siyasah

Fiqh Siyāsah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman, terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Kata “*Fiqh Siyāsah*.” merupakan *tarkib idafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyāsah. Secara etimologi, “*fiqh*” merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqihayafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, “*fiqh*” lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁸

Kata “*al-Siyāsah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyāsatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.³⁹ Ibnu Aqil mendefinisikan “*Siyāsah*” adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun

³⁷ Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, PT. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, hlm, 59

³⁸ Ibnu Syarif Mujaar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 31

³⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 25

Rasulullah SAW tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.⁴⁰

Imam Al-Mawardi dalam “*Al-ahkam As-sulthaniyyah*” menjelaskan siyāsah sebagai “*Kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirosatuddin wa raiyyatuddunya).*”

Sesungguhnya Allah Ta’ala yang amat agung kebesaran-Nya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandat mengatur negara, agar ia mengeluarkan kebijakan yang bersumber dari agama yang disyari’atkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama.⁴¹

Secara efiestimologi, pengertian fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴² Istilah lain dari pengertian tersebut secara populer dikenal dengan ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang masuk ke dalam kategori pranata sosial Islam. Didalam fiqh siyasah, tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif disebut *al-sulthah al-tanfidzyiah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sulthah al-tasyri’iyah* yang berwenang membentuk Undang-Undang (legislatif), dan *al-sulthah al-qadha’iyyah* yang

⁴⁰ *ibid.*, hlm, 27

⁴¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*. (Jakarta: PT Darul Falah, 2007) hlm. 38

⁴² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm 26

berkuasa mengadili setiap sengketa. Tiga istilah tersebut muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.

2. Ruang Lingkup Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyāsah. Ada yang menetapkan lima bidang, empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang. Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyāsah mencakup:⁴³

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyāsah Dusturiyyah).
2. Ekonomi dan militer (*Siyāsah Mālīyah*).
3. Peradilan (*Siyāsah Qadā'īyah*).
4. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyah*).
5. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyah*).

Sedangkkn Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan
2. Administrasi negara
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

⁴³ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 36

1. Peradilan
2. Hubungan internasional
3. Keuangan negara

T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan bidang, yaitu:⁴⁴

1. *Siyāsah Dusturiyyah Syar'īyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. *Siyāsah Tasyri'īyyah Syar'īyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyāsah Qadā'īyyah Syar'īyyah* (kebijaksanaan peradilan).
4. *Siyāsah Māliyyah Syar'īyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. *Siyāsah Idariyyah Syar'īyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah. Kharijiyyah Syar'īyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'īyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'īyyah* (politik peperangan).

Berbagai cakupan ruang lingkup fiqh siyāsah di atas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok, yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*) Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'īyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadā'īyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 13

2. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah Kharijiyyah*) Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyāsah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:⁴⁵

1. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyāsah al-Dusturiyah*) Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadā''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik Luar Negeri (*al-Siyāsah al-Kharijah*) Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyāsah al-Duali al-Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyāsah al-Māliyah*) Permasalahan yang termasuk dalam siyāsah māliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

⁴⁵ *Op.cit.* hlm 41

3. Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakana untuk menunjukkan anggotanya.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁴⁶

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁷

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014) hlm. 3

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 154

Di dalam kurikulum fakultas syari'ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi: "Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya." Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."⁴⁹

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁵⁰

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁵¹

⁴⁹ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hlm. 52

⁵⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, hlm. 46-47

⁵¹ *Op.cit.*, Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah....., hlm. 154

Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.⁵²

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵³

Didalam Fiqh Siyasah kontemporer, kekuasaan eksekutif disebut *al-sulthah al-tanfidiyyah*. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah pemimpin wilayah, panglima militer, penarik pajak, pengatur keamanan, dan semua aparat pemerintahan.

Ada dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah, Undang-Undang yang dikeluarkan *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah Undang-Undang ilahiah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun hal ini sedikit karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak bicara masalah-masalah yang global dan sedikit yang menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara

⁵² *Op.cit.*, A. Djazuli, Fiqh Siyasah..... hlm. 47

⁵³ *Op.cit.*, Muhammad Iqbal,..... hlm. 48

perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat. *Kedua*, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap masalah-masalah yang secara tegas tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Disinilah perlunya, *al-sulthah al-tasyri'iyah* diisi oleh para mujtahidin dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan ilmu yang mereka miliki. Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi, dimana seluruh rakyat berhak duduk sebagai lembaga legislatif. Wakil-wakil yang duduk dilembaga legislatif tidak dipersyaratkan memiliki kemampuan ijtihad, melainkan cukup dipilih oleh rakyat.

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh sebuah Mahkamah Agung (*supreme court*). Macam-macam kekuasaan kehakiman tidak sama disemua Negara, tetapi biasanya terdiri dari Peradilan Umum dan Militer.

Kekuasaan yudikatif dalam fikih siyasah disepadankan dengan *al-sulthah al-qadha'iyyah* yang dipegang oleh *qadhi* atau hakim. Pada awalnya, kekuasaan yudikatif dipegang oleh khalifah sekaligus. Namun, khalifah juga mengangkat para *qadhi* diMadinah, Syuriah sebagai *qadhi* diBasrah, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai *qadhi* diKufah. Mereka diangkat untuk memimpin bidang peradilan dan hukum. Penentuan *qadhi* kadang-kadang diserahkan kepada para penguasa wilayah. Seperti yang pernah terjadi pada masa khilafah Ali yang menyerahkan kepada al-Nakha'i ketika diutus kemesir. Praktik peradilan yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan bahwa khalifah adalah ketua lembaga

peradilan, sedangkan para *qadhi* adalah wakil-wakilnya disejumlah daerah karena luasnya jarak dengan pusat kekuasaan.

Pada masa Dinasti Umayyah, *al-qadha* dikenal dengan *nizham al-Qadhaaiy* (organisasi kehakiman), dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Ada dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu:

1. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma'. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah.
2. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Keputusan mereka tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, tetapi juga pada penguasa-penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan.⁵⁴

Khalifah mengangkat *Qadhi-qadhi* yang bertugas diibu kota pemerintahan, sementara *qadhi* yang bertugas didaerah diserahkan pengangkatannya pada kepala daerah tersebut. Permasalahan yang bisa ditangani oleh *qadhi* ini terbatas pada masalah-masalah khusus, sementara yang melaksanakan keputusan itu adalah khalifah.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1993), cet IV, hlm. 20

⁵⁵ Asadullah al-faruq', *hukum acara peradilan Islam* (Jakarta:Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 47

Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman dimasa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu⁵⁶

1. *Al-qadhaa* merupakan tugas *Qadhi* dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu, badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.
2. *Al-Hisbah* merupakan tugas *al-muhtasib* (kapala hisbah). Dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Terbentuknya peradilan yang menangani kasus *al-hisbah*, dimana sebelumnya belum dibentuk lembaga resmi Negara. Kewenangan wilayah *al-hisbah* sesungguhnya merupakan wewenang untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, serta menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat. Upaya ini digolongkan pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan-ketentuan hukum agar dapat terealisasi dalam masyarakat secara maksimal. Disamping itu wilayah hisbah memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
3. *Al-nadhar fi al-mazhalim*. Merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah dibawahnya (*al-qadha dan alhisbah*). Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Pada pengadilan ini didalam melakukan sidang langsung dibawah pimpinan khalifah. Dalam menjalankan tugasnya ketua *mahkamah mazhalim* dibantu oleh lima orang pejabat, seperti *Pembela* yang bertugas sebagai mengalahkan

⁵⁶ Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2012), hlm 80

pihak terdakwa yang menggunakan kekerasan atau melarikan diri dari pengajeran pengadilan, *Hakim* sebagai penasihat bagi kepala *mahkamah mazhalim*, sehingga dengan berbagai cara. Apa yang menjadi hak pihak yang teraniaya dapat dikembalikan, *ahli fikih* sebagai tempat para *mahkamah mazhalim* mengembalikan perkara syariah yang sulit menentukan hukumnya, *sekertaris* bertugas mencatat perkara yang diperselisihkan dan mencatat ketetapan apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang berselisih, dan *saksi* yang bertugas memberikan kesaksian terhadap ketetapan hukum yang disampaikan oleh hakim yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁵⁷

Dalam sistem ketatanganan pastilah terdapat seseorang pemimpin yang memimpin orang disekitarnya, kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *fiqh siyasah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut berdasarkan sumber dari *Al-Qur'an* dan hadist.

Argumen al-Tûfi untuk mendukung tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain, didasarkan pada firman Allah, misalnya Tuhan menginginkan kemudahan untuk kamu, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kamu. (QS al-Baqarah: 2:185). “Allah ingin meringankan beban kamu” (QS al-Nisâ’: 28) “Dia (Allah) tidak menetapkan kesulitan kamu dalam agama”(QS al-Mâidah: 6). Menurut al-Tûfi, hadits *la dzarâra wa la dzirâra diatas*, memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang

⁵⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang:Pt Pustaka Rezki Putra, 2001), cet. Ke-2. Hlm 53

merugikan, yaitu tidak boleh melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan sosial, harus diberi prioritas pertimbangan di atas seluruh sumber hukum tradisional atau argument-argumen madzhab-madzhab hukum muslim; harus membatasi serta mengkhususkan validitas atau aplikasi sumber-sumber hukum tersebut dalam rangka mengakhiri terciptanya kerugian dan kejahatan sosial sebagai upaya merealisasikan kebaikan atau kemaslahatan sosial dalam praktek aktual. Sumber-sumber hukum tradisional yang paling kuat menurut al-Tûfi adalah consensus para ahli hukum (ijmâ') dan teks-teks keagamaan (Alquran dan Sunnah atau hadits-hadits Nabi). Jika dua sumber ini sejalan dengan perlindungan kemaslahatan manusia, maka semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, jika tidak sejalan, maka perlindungan kemaslahatan menduduki prioritas di atas kedua sumber tersebut. Pemberian prioritas kepada perlindungan kemaslahatan, kata al-Tûfi tidak dimaksudkan untuk menghentikan atau menyangkal serta total validitas dua sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan fungsinya yang proposional. Menurutnya, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum paling tinggi dan paling kokoh karena ia merupakan tujuan pertama agama dan poros utama dari maksud syari'ah. Untuk mendukung pendapat ini, al-Tûfi menyatakan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia sebagai tujuan dibalik semua aturan hukum, dibalik petunjuk Tuhan dan penciptaan manusia serta cara-cara untuk memperoleh mata pencaharian mereka. Konsekuensinya, dalam pandangan al-Tûfi, hakim tertinggi atau otoritas paling tinggi dari kemaslahatan hukum dan sosial manusia adalah akal atau intelegensia

manusia sendiri. Sebab menurutnya, kemaslahatan hukum atau sosial manusia diketahui atau dapat diketahui oleh mereka melalui sinaran intelegensi, akal atau pengalaman hidup mereka. Pengetahuan atau pola pemahaman seperti ini sangat alami dan telah dianugerahkan oleh Tuhan, Oleh sebab itu, kata al-Tûfi bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sesuatu yang riil di dalam dirinya dan tidak diperdebatkan. Lain halnya dengan teks-teks keagamaan, yang menurut alTûfi saling berbeda dan bertentangan, tidak seperti perlindungan terhadap kemaslahatan manusia, yang dipandang sebagai sesuatu yang riil dan substansial. Teks-teks keagamaan, kadang-kadang bersifat mutawâtir dan kadang bersifat ahad, kadang jelas dalam pernyataannya (secara harfiah dalam aturan hukumnya atau qath'i) dan ada pula muhtamal (dhanni).⁵⁸

Peraturan tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak diatas bumi ini, kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhoi kita seperti Q.S. Al-Imran (3) 27 :

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau

⁵⁸ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)” (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2414/2394.htm> (2 januari 2019)

keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".⁵⁹

Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, ras, dan suku ataupun yang lainnya tetapi kita haruslah tetap saling mengenal, karena agama Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Ditengah keberagaman tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin orang-orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah harus mempunyai syarat sendiri, seperti Q.S. An-Nisa (4) 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْنَا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

Selain adil, seseorang pemimpin haruslah mempunyai sifat musyawarah dan memecahkan suatu permasalahan, seperti perintah Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. Al-Quran Ali-Imran (3) 159:

⁵⁹ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung:CV Penerbit Dipenogoro, 2015), hlm. 53.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 352.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَظْهَرْ لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”⁶¹



⁶¹ Ibid, hlm. 452

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Sejarah Komisi Yudisial

Komisi Yudisial lahir dari sebuah konsekuensi politik dari adanya amandemen konstitusi yang ditujukan untuk membangun sistem *check and balance* didalam sistem dan struktur kekuasaan, termasuk didalamnya pada subsistem kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial memperoleh justifikasi hukum yang sangat kuat setelah keberadaan lembaga tersebut secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan fakta keberadaan lembaga Komisi Yudisial ada diberbagai negara dan dapat menjadi idikasi penting bahwa memang ada kebutuhan diberbagai negara untuk memberikan perhatian pada lembaga kekuasaan kehakiman. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pembentukan Komisi Yudisial, yaitu :

1. Memberikan jaminan agar proses recruiting hakim dilakukan secara perofesional dan tidak bias dari kepentingan politik.
2. Meningkatkan kualitas kinerja lembaga kekuasaan kehakiman sehingga kian efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman dengan melihat partisipasi publik.⁶²

⁶² Bambang widjajanto, “Komisi Yudisial : *check and balance* dan Urgensi Kewenangan Pengawasan”, Bunga Rampai Refleksi 1 Tahun KYRI, 2010. hlm 112

Didalam konteks Indonesia, ada beberapa alasan lain menjadi dasar faktual dibentuknya Komisi Yudisial, antara lain:

1. Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis, untuk itu Negara harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Untuk memastikan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan suatu lembaga pengawas baik dari Mahkamah Agung sendiri maupun dari lembaga tertentu lainnya yang berpungsi untuk menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan menjaga perilaku hakim;
3. Lembaga kekuasaan kehakiman sendiri, khususnya Mahkamah Agung sendiri maupun dari lembaga tertentu lainnya yang berfungsi untuk menegakkan kehormatan keluhuran martabat menjaga perilaku hakim;⁶³

Berpijak dari hal tersebut diatas, keberadaan dari Komisi Yudisial didalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah suatu keniscayaan. Kendati bukan sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman tetapi keseluruhan fungsinya dapat menjadi sangat strategis bila kewenangan yang melekat padanya dilakukan secara optimal dan amanah.

Jauh sebelum Komisi Yudisial lahir, para pemerhati dan praktisi hukum telah berupaya untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pada tahun 1968 saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimunculkan

⁶³ Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 281 ayat (5) UUD 1945

ide perlunya sebuah lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Namun demikian politik hukum nasional, ternyata tidak menghendaki kelahiran lembaga tersebut, padahal secara obyektif fungsi MPPH tersebut sangat menjanjikan terbentuknya peradilan yang berwibawa. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dari fungsi MPPH meliputi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau asal usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberitahuan, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan baik oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman. Dalam perkembangannya, ide tersebut kembali mengemuka pada akhir dasawarsa 90-an yakni dengan lahirnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yang mengamanatkan perlunya dipisahkan secara tegas fungsi-fungsi pemerintah (eksekutif) dan yudikatif.³ Kemudian diikuti lahirnya Tim Terpadu Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR RI No. X/MPR/1998 yang dibentuk dengan Keppres No. 21 Tahun 1999 yang merekomendasi perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun code of conduct bagi hakim.⁴ Dalam perkembangan rekomendasi Tim Terpadu tersebut "mewarnai" UUNo. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁵ Gagasan pembentukan sebuah komisi yang dapat menjadi pendorong (sporting) kekuasaan kehakiman yang merdeka terus bergulir, hal ini

dapat dilihat dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang dalam salah satu ketentuannya mengamanatkan perlunya dibentuk Komisi Yudisial untuk melakukan fungsi pengawasan. Akhirnya, jaminan eksistensi Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan RI dapat dilihat dalam Pasal 24B UUD 1945. Dalam Pasal 24B ayat (1) ditegaskan bahwa: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁶⁴

Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada sidang Tahunan MPR Tahun 2001 yang membahas amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk didalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pada amendemen ketiga itulah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai anaggota ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui Keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005. Dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus

⁶⁴ Muhammad Fauzan, “EKSISTENSI KOMISI YUDISAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN YANG SEHARUSNYA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” (On-Line), tersedia di : <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/29> (2 Januari 2019)

2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden, sebagai awal memulai masa tugasnya.

Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).

Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Perwujudan Indonesia sebagai Negara hukum melalui *check and balances* antara lembaga Negara dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif lebih menonjol setelah dibentuknya beberapa lembaga Negara baru melalui perubahan UUD 1945 tersebut, salah satu lembaga baru yang dibentuk melalui amandemen UUD 1945 adalah Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) adalah :

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Yang dimaksud Komisi Yudisial dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. “ Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat

mandiri dalam pelaksanaan wewenanganya bebas dari campur tangan atau kekuasaan lainnya.⁶⁵

Dari ketentuan tersebut maka Komisi Yudisial adalah Lembaga yang mandiri atau independen. Secara epistemologi independen berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri. Tidak adanya campur tangan dengan kekuasaan lain atau ketidak bergantungan suatu pihak dengan pihak yang lainnya seperti eksekutif, ataupun legislatif.

Didalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan juga bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Ketentuan ini bersifat imperatif menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial yang selain tugas-tugas melakukan pengawasan perilaku hakim.

Sesuai amanat reformasi mewujudkan peradilan yang bersih, independen, dan akuntabel, maka Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24 B UUD 1945, pasal tersebut menegaskan bahwa KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya diimplementasikan secara operasional dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, KY dibentuk sebagai institusi pengawasan diluar struktur MA, struktur baru ini membuka peluang masyarakat terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung serta peduli dalam proses penilaian terhadap etika

⁶⁵ Pasal 1 ayat (1) dan 2 UU No. 22 Tahun 2004 *Tentang Komisi Yudisial*

kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika itu, dengan demikian pengertian independensi atau mandiri disini haruslah dipahami dalam arti bebas dari intervensi kepentingan para hakim yang kewibawaannya sendiri perlu dijaga oleh KY.⁶⁶

Pada tahapan konstitusi, kewenangan KY sudah demikian jelas, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung, namun untuk wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim seringkali multi tafsir.⁶⁷

Pada masa awal KY menjalankan fungsi dan tugasnya, terdapat banyak tantangan terkait dengan fungsi pengawasan hakim.

Pertama, adanya gejala resistensi kalangan hakim. Hal ini dipicu oleh anggapan ketidakjelasan yurisdiksi pengawasan hakim, implikasinya berpengaruh kepada hubungan tidak harmonis antara MA dan KY.

Kedua, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dimana Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tidak dibatalkan, namun pasal-pasal yang menyangkut wewenang pengawasan dibatalkan MK, akibatnya KY sulit menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sesuai mandat Pasal 24B UUD 1945.

Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal KY terhadap hakim adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa dan sesuai dengan peraturan perundang-

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Yarsif Watampone, 2003, hlm 54-55

⁶⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm 41

undangan, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), tujuan pengawasan tersebut diturunkan kedalam sejumlah wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, yakni :

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim,
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim,
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan/atau perilaku hakim; dan
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.⁶⁸

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggung jawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara :

1. Menerbitkan laporan tahunan
2. Membuka akses informasi dengan secara lengkap dan akurat.

Laporan tersebut setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan penggunaan anggaran
2. Dana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dan;
3. Data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung, laporan disampaikan pula terhadap kepala Presiden,

⁶⁸ Pasal 22 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dari penegasan diatas dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk kedalam lembaga negara setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independent yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri.

Memang benar bahwa kewenangan Komisi Yudisial seperti halnya Mahkamah Agung dan mahkamah Konstitusi, juga diatur dalam dalam UUD 1945. Tepatnya, Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24A, Komisi Yudisial dalam pasal 24B, sedangkan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C UUD 1945. Akan tetapi, pengaturan mengenai kewenangan suatu lembaga dalam UUD tidak mutlak harus diartikan bahwa lembaga yang bersangkutan adalah lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga tinggi negara. Sebabnya istilah Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara juga diatur dalam kewenangannya dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal 30. Namun fungsi organisasi tentara dan kepolisian sebenarnya termasuk kedalam kategori fungsi pemerintahan (eksekutif), sehingga kedudukan protokolernya tidak dapat disederajatkan dengan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK hanya karena kewenangannya sama-sama diatur dalam UUD 1945. Mirip dengan itu, Komisi Yudisial juga tidak dapat disejajarkan dengan lembaga tinggi negara yang lain hanya karena wewenangnya diatur dalam pasal 24B seperti halnya kewenangan tentara dan kepolisian yang diatur dalam pasal 30 UUD 1945.

Komisi yudisial bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan lembaga yudikatif, eksekutif,

apalagi legislatif. Ia hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Komisi Yudisial juga bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintahan ataupun dengan lembaga perwakilan rakyat.

Komisi Yudisial merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur dalam pasal 24A, KY diatur dalam pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B, dan MK diatur dalam pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*”. Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan MA. Akan tetapi pasal 24 ayat (2) 1945 telah menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ* atau seperti yang ditegaskan oleh seorang mantan anggota PAH I BP MPR yang telah diuraikan diatas yang tidak dibantah oleh para mantan anggota PAH I BP MPR lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (spirit) konstitusi dimaksud, prinsip *check and balance* tidak dapat berlangsung antara MA sebagai Principal organ dengan KY sebagai *auxiliary organ*. KY bukanlah pelaksanaan kekuasaan

kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun berisfat mandiri.

Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.⁶⁹

Sejak awal berdiri, Komisi Yudisial telah menetapkan garis Kebijakan yang menempatkan civil society sebagai mitra strategis. Dalam kerangka ini Komisi Yudisial menyadari betul bahwa upaya mensosialisasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada kalangan hakim tak akan bisa dilakukan tanpa memperkuat sistem di internal. Dalam kaitan itu, Komisi Yudisial melakukan penataan mekanisme pengaduan. Verifikasi atas pengaduan masyarakat merupakan langkah yang selalu ditempuh Komisi Yudisial.¹⁴ Kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, pasal 20A ayat (1) point d yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁷⁰ Undang-Undang mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial merupakan

⁶⁹ Nimatul huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2007) hlm. 160

⁷⁰ Komisi Yudisial Tegaskan Menjaga Independensi Peradilan, Buletin Komisi Yudisial Vol. VIII No. 2 September-Oktober, 2012, hlm. 9.

pengawas eksternal perilaku hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Faktanya bahwa sebagian besar laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial menyangkut perilaku hakim dalam mengadili dan/atau memutus/menetspsn putusan, sehingga tidak bisa terhindarkan dalam memeriksa laporan masyarakat, Komisi Yudisial harus membaca putusan sebagai pintu masuk dan/atau bukti terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan laporan masyarakat, berpedoman pada 10 butir perilaku utama sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diorientasikan untuk membangun sistem checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman. Melihat kewenangan yang dimiliki, Komisi Yudisial merupakan organisasi publik yang dituntut bisa menjalankan aktivitasnya secara fleksibel dan mudah dikembangkan sejalan dengan perkembangan situasi eksternal. Penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial seperti diatur dalam Undang-Undang revisi ini, merupakan upaya untuk mengatasi perilaku menyimpang hakim agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang serta kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁷¹

Komisi Yudisial merupakan suatu Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan (pengawasan external) terhadap hakim, dan meningkatkan kapasitas hakim, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang

⁷¹ Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH) (On-line), tersedia di (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3838/3356> (20 september 2018)

transparan dan partisipasi guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai dengan pasal 24B UUD 1945, serta pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.⁷²

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang ada pada struktur ketatanegaraan Indonesia. Setiap lembaga yang dibentuk bukan oleh masyarakat atau dengan kata lain merupakan hasil bentukan Negara dapat disebut sebagai lembaga Negara atau organ Negara. Apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan menurut konsep trias politica, lembaga Negara dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.⁷³

Menurut Montesquieu, disetiap Negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang di organisasikan kedalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau Undang-undang Negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil. *(in every government, there are three sort of power: the legislative, the executive in respect to things dependent on the law of nation, and the executive in regard to matters that depend on civil law)* yang artinya dalam setiap pemerintahan, ada tiga jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif dalam hal-hal yang bergantung pada hukum negara, dan eksekutif dalam hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.

⁷²Mustafa Abdullah, Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bertmartabat dan Profesional, *Buletin Komisi Yudisial* Vol. II No 2- Oktober 2007

⁷³Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 65

. Menurut Lee Cameron Mc Donald, yang dimaksudkan oleh Montesqieu dengan perkataan “*the executive in regard to matters that depend on the civil law*” itu tidak lain adalah the *Judiciary*.⁷⁴

Montesqieu mengidealkan bahwa ketiga fungsi kekuasaan Negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesqieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁷⁵

Dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, pembagian kekuasaan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 merupakan bagian integral dari hakikat hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan hukum demokrasi, dan keadilan. Sistem pembagian kekuasaan yang sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia dimana kekuasaan itu dibagi habis kedalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau pelaksanaan pemerintahan dalam Negara, selanjutnya kekuasaan

⁷⁴Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30-31

⁷⁵*Ibid.*, hlm 31

yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi atau mengontrol pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif⁷⁶

Dari tinjauan umum tentang lembaga Negara diatas, dapat dihubungkan bahwa Komisi Yudisial merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Negara berdasarkan konstitusi atau peraturan perundangundangan yang kewenangan dan kedudukannya diatur oleh peraturan dibawahnya. Keberadaan Komisi Yudisial merupakan fenomena baru yang muncul setelah bergulirnya pergerakan reformasi yang mendorong dilakukanya amandemen terhadap Undang-undang dasar 1945, pada amandemen ketiga UUD1945 Komisi Yudisial sengaja didirikan sebagai *auxiliary organ* (badan pembantu) bagi pengawasan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Komisi Yudisial. Dibentuknya Komisi Yudisial kian memperbanyak jumlah institusi Negara yang mandiri (*state auxilliaris institution*) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan: “Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya,”

Dari ketentuan tersebut maka Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang mandiri (independence). Secara etimologi istilah “mandiri” berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri.⁷⁷ Tidak adanya campur tangan dari

⁷⁶ Sinamo Nomensen, *Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 45

⁷⁷ Partanto A. Pius, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 250

kekuasaan lain atau tidak bergantung kepada pihak lainnya dalam literatur juga berarti “indepnden” dari bahasa inggrisnya Independence.⁷⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga pengertian independensi, yaitu:

1. Structural Independence, yaitu independensi kelembagaan dimana struktur suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lain.
2. Functional independence, yaitu independensi yang dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan dari struktur kelembagaanya.
3. Financial Independence, yaitu dilihat dari kemandirianya menentukan sendiri anggaran yang dapat dijamin kemandiriannya dalam menjalankan fungsi.⁷⁹

Kontruksi pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia menurut Hobbes Sinaga, amatan Panitia Adhoc I Badan Pekerja MPR, yang 31 Partanto A Pius, terlibat dalam perubahan UUD 1945, bahwa pembentukan Komisi Yudisial, difungsikan untuk menjaga kemandirian Mahkamah Agung dengan kewenangan lain yang perlu pembahasan. Hal yang sama disampaikan Harun Kamil, bahwa munculnya Komisi Yudisial pada awalnya bertugas untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang tambahan dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Secara umum kontruksi pembentukan Komisi Yudisial dijelaskan oleh Sutjipto, bahwa Komisi Yudisial diadakan untuk menjamin adanya *cheks and balances* dalam keseluruhan proses penyelenggaraan ketatnegeraan Indonesia. Namun bukan berarti bahwa Komisi Yudisial adalah merupakan cabang kekuasaan tersendiri melainkan bahwa Komisi Yudisial adalah

⁷⁸ Sirajuddin dan Zulkarnaen, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 75

⁷⁹ Sinamo Nomensen, *Hukum Tata Negara ...Op.cit*, hlm. 76

sebagai *supporting organ*. Komisi Yudisial dalam rangka *cheks and balances* adalah untuk mengontrol perilaku hakim demi menjaga martabat dan kehormatan hakim keseluruhannya. Hasil pembahasan panitia Adhoc I badan pekerja MPR tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang dibahas badan legislasi DPR relatif lebih komperhensif dibandingkan dengan Komisi Yudisial di Negara lain. Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional baru dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat dengan organ konstirusional lainnya. Kenyataan ini dapat dilihat dari di akomodasinya pasal 14 Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung pada DPR, menetapkan kehormatan dan keluhuran serta menjaga perilaku hakim. Dengan kata lain mengusulkan calon anggota Komisi Yudisial juga untuk mengawasi perilaku hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.⁸⁰

Komisi Yudisial bukan lembaga Kekuasaan Kehakiman, tetapi lembaga Negara yang tugasnya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakaiman yang “Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat serta perilaku hakim.” Dengan demikian, Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan penmgawasan eksternal terhadap hakim.⁸¹

⁸⁰ Titik Truwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Ketatatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 89-92.

⁸¹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm 269

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, tidak menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman. Komisi ini bukan lah lembaga penegak norma hukum (code of law). Melainkan lembaga penegak norma etik (code of ethic). Walaupun Komisi Yudisial ditentukan sebagai lembaga yang independen, tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggung jawab oleh Undang-Undang. Pasal 38 Undang-Undang Komisi Yudisial menentukan:

1. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
2. Pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menerbitkan laporan tahunan, dan
 - b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan penggunaan anggaran.
 - b. Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, dan
 - c. Data yang berkaitan fungsi rekrutmen Hakim Agung.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula pada Presiden.

5. Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan menurut ketentuan Undang-Undang.

Kedudukan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi :

Pasal 1 butir ke-1 : Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 2 ayat (1) : Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pengawasannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Kemandirian Komisi Yudisial juga dijelaskan dalam UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam pasal 24B. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24B disebutkan :

Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 24B ayat (3) : Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Pasal 24B ayat (4) : Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur oleh Undang-Undang.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945 disamakan dengan lembaga-lembaga lain yang diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini ditentukan dan diatur tersendiri oleh UUD 1945, karena dianggap mempunyai kedudukan dan posisi yang penting dalam upaya menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Dari penegasan diatas, dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan indonesia dengan lembaga Negara lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada tujuh lembaga Negara, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) adalah termasuk kedalam lembaga Negara setingkat dengan lembaga tersebut dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga Negara mandiri. Menurut A. Hasin Thohary, Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional HAM 50 (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan komisi-komisi lainnya, karena dua alasan sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu pasal 24B.
2. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman karena pengaturannya ada dalam BAB IX Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.

Banyak para pakar mengatakan, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga penunjang atau pembantu (state auxiliary organ), dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Tetapi penyebutan itu hanyalah bersifat akademis saja mengingat secara konstitusional istilah itu sama sekali tidak dikenal. Dari sudut materi tugas yang dibebankan, Komisi Yudisial memang merupakan lembaga yang membantu dalam pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman, tetapi sebagai lembaga Negara yang menjadi “pengawas eksternal” Komisi Yudisial sebenarnya adalah lembaga Negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan didalam Pasal 24 B ayat (1).⁸²

B. Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Komisi Yudisial

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial sangat terkait dengan batasan fungsi yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Sebab tugas dan wewenang pada dasarnya penjabaran lebih lanjut dari fungsi pada Komisi Yudisial.⁸³

Dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah “wewenang” untuk menunjuk fungsi yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penggunaan istilah “wewenang” menurut Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung kurang tepat karena kata wewenang biasanya diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk menjalankan tugasnya. Sementara wewenang Komisi Yudisial berarti dalam rangka apa Komisi Yudisial dibentuk dan tugas menunjukan hal-hal

⁸² *Ibid* hlm. 117

⁸³ Naskah Akademik dan Rancangan Tentang Komisi Yudisial, 2007, hlm. 27

apa yang wajib dilakukan oleh suatu lembaga guna mencapai fungsi yang diharapkan.⁸⁴

Dalam Undang-undang Komisi Yudisial digunakan istilah wewenang dan tugas, tidak dijabarkan tentang fungsi Komisi Yudisial. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) mengandung pengertian tugas (*plichten*) dan hak (*rechten*). Menurut Bagir Manan, wewenang mengandung makna kekuasaan (*macht*) yang ada pada organ, sedangkan tugas dan hak ada pada pejabat dari organ.⁸⁵

Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa itu, Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi adalah bersifat konsitusional. Wewenang pengawasan oleh Komisi Yudisial itu meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (3) dan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang diimplementasikan dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial tersebut, diperkuat juga oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) ini menentukan bahwa : "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi

⁸⁴ Sirajudin dan Zulkarnaen, *Op.cit.*, hlm. 77

⁸⁵ *ibid.*, hlm 77-78

Yudisial yang diatur dalam undang undang. ” Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, code of conduct hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah sesungguhnya letak peranan penting dari Komisi Yudisial dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia. Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keadaan yang demikian itu tentu tidak hanya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga supremasi hukum atau penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁸⁶

⁸⁶ Nurul Chotidjah, “EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 secara parsial dan tidak langsung telah mengatur kewenangan Komisi Yudisial berkaitan dengan proses pengusulan calon Hakim Agung. Sedangkan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengurai kewenangan Komisi Yudisial menjadi dua hal:⁸⁷

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 13 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA” (On-Line), tersedi di :
<https://www.neliti.com/publications/25257/eksistensi-komisi-yudisial-dalam-mewujudkan-kekuasaan-kehakiman-yang-merdeka> (2 januari 2019)

⁸⁷*Op.cit.*, hlm 18

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran kesejahteraan hakim;
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim;
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
4. Aparat penegak hukum Wajib menindak lanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tugas yang melekat pada pejabat Komisi Yudisial adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim, Komisi Yudisial bertugas:
 - a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.

- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
- 2. Menetapkan calon Hakim Agung, dan d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
 - c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan pada Presiden.

Berdasarkan ketentuan lain, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

Pasal 42 ayat (1) : Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Untuk mendukung berlangsungnya fungsi pengawasan, Komisi Yudisial diberi kewenangan untuk menentukan tindakan-tindakan, beberapa tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

disebutkan, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 20 Komisi Yudisial disebutkan pada Pasal 22 ayat (1) :

1. Menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku hakim;
2. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Yudisial wajib Pasal 2 ayat (2):

1. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
2. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Yang dimaksud dengan mentaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya tidak memperlakukan semenamena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa, hal ini untuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan

memutus perkara (pasal 22 ayat 3). Itu artinya, hakim tetap diberikan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya.

Fungsi Komisi Yudisial :

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang insentif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakimandari pengaruh kekuasaan appaun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (judicial power akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik akan menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakikaman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial)
5. Dengan adanya Komisi Yudisial kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung

dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik⁸⁸.

C. Peran Komisi Yudisial Terhadap Peningkatan Kapasitas hakim

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 pasal 20 Ayat (2) yaitu :

“Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim”

Peningkatan kapasitas hakim merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan hakim yang mempunyai kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH. Peningkatan kapasitas hakim memiliki landasan filosofis yang jelas. Landasan adalah alas, dasar, atau tumpuan, atau dikenal dengan fundasi. Mengacu kepada hal itu, landasan itu menjadi dasar pijakan, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal atau suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal yang menunjuk kepada landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, nilai-nilai, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir (melakukan suatu studi dan atau dalam rangka bertindak).

Pada hakikatnya, peningkatan kapasitas hakim adalah sebuah proses humanisasi. Tujuannya menciptakan dan membentuk hakim-hakim ideal yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan telah

⁸⁸ Pengertian Komisi Yudisial Fungsi Kewenangan dan Undang-Undang” (On-line), tersedia di: <http://www.Sarjanaku.com/2013/03/pengertian-komisi-yudisial-fungsi.htm> (02 September 2018).

ditetapkan, yaitu berharap membentuk hakim menjadi sosok ideal, berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil mampu berperan dalam kehidupan sebagai agen perubahan. Sebab itu, peningkatan kapasitas hakim harus dapat dipertanggung jawabkan, tidak dapat dilaksakana secara bijaksana, terarah dan terprogram. Artinya peningkatan kapasitas hakim dilakukan secara sadar dengan mengacu kepada suatu landasan yang kokoh, sehingga jelas tujuannya, tepat isi kurikulumnya, serta efisien dan efektif cara pelaksanaannya.⁸⁹

Berdasarkan amanah undang-undang Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas Hakim. Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang diarahkan untuk melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dilakukan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun

Hakim sebagai sebuah profesi memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang wajib ditaati oleh setiap orang yang berprofesi sebagai hakim. Pelatihan KEPPH merupakan pelatihan yang bertujuan:

- a. Menitikberatkan pada ranah afektif yang berhubungan dengan sikap/perilaku;

⁸⁹Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Grand Desain Peningkatan Kapasitas Hakim

- b. Adanya perubahan tingkah laku kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta pelatihan;
- c. Memahami dan menerima hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim;
- d. Memberikan alasan dan membuat pilihan mengapa nilai dalam KEPPH lebih penting dibandingkan nilai yang lain.

Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan bagi hakim agar mereka memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH dan lebih jauh lagi dapat memahami dan menghayati KEPPH dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Metode pembelajaran yang digunakan adalah:

- 1) Metode sistem andragogi (partisipasi aktif yang merata dari semua peserta, suasana yang saling menghargai, suasana serius tapi santai);
- 2) Pendekatan experiential learning dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

2. Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8 – 15 Tahun

Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun dirancang untuk meningkatkan integritas dan mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam satu filsafat yang utuh. Program kegiatan bertujuan menitikberatkan pada:

- a. Adanya perubahan tingkah laku/kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta pelatihan.

- b. Berperilaku dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH.
- c. Mengintegrasikan dan merumuskan filsafat kehidupan professional yang didasari KEPPH.

Manfaat yang diharapkan dari adanya kegiatan ini adalah penguatan KEPPH didalam diri hakim melalui serangkaian kegiatan yang berorientasi pencegahan terintegrasi dapat memberikan multiplayereffect bagi stakeholder Komisi Yudisial. Menguatnya integritas hakim akan berdampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap hakim sehingga muncul kepercayaan terhadap hakim dan penegakan hukum.

Evaluasi Pasca Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dampak keberhasilan pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun. Idealnya evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh peserta pelatihan baik itu peserta pelatihan Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 s.d. 8 Tahun maupun peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun, namun evaluasi baru dapat dilakukan pada pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8 s.d. 15 Tahun.

Metode pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh peserta pelatihan Pemaknaan KEPPH, rekan sejawat maupun atasan dari peserta pelatihan yang kemudian diperdalam dengan wawancara terhadap peserta pelatihan dan atasan peserta pelatihan. Pada Tahun 2017 kegiatan ini dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengukuran terhadap peserta pelatihan pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun (angkatan III) di Pengadilan Agama Gorontalo dilaksanakan pada Tanggal 6 s.d. 10 Februari 2017, adapun responden pengukuran adalah 1(satu) orang hakim di wilayah pengadilan Bandar Lampung;
2. Pengukuran terhadap peserta pelatihan pemaknaan KEPPH (hakim 0-8 tahun) di Propinsi Bandar Lampung yang merupakan hasil daripelaksanaan pelatihan Bogor pada Tanggal 15-20 Mei 2017 Angkatan XII, adapun responden pengukuran adalah 16 orang hakim di wilayah pengadilan Bandar Lampung, berikut masing-masing atasan dan rekan sejawat peserta, sehingga total responden dalam kegiatan ini adalah 32 orang. Adapun kegiatan dilaksanakan pada 21-24 November 2017;
3. Pengukuran terhadap peserta pelatihan pemaknaan KEPPH (hakim 0-8 tahun) di Jawa Tengah dan Banten yang merupakan hasil daripelaksanaan pelatihan Bogor pada Semester I 2017, adapun responden pengukuran adalah 15 orang hakim di wilayah pengadilan Bandar Lampung, berikut masing-masing atasan dan rekan sejawat peserta, sehingga total responden dalam kegiatan ini adalah 30 orang.

Upaya KY untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim pada tahun 2017 dilakukan melalui kegiatan pengkajian jaminan kesehatan, kajian tersebut dilakukan melalui penelitian deskriptif terhadap 186 responden hakim pengadilan tingkat pertama di wilayah DIY, Mataram, Mamuju, Pontianak, Jawa Barat dan

terhadap para hakim militer peserta pelatihan KEPPH 0-8 tahun, melalui penyebaran kuesioner jaminan kesehatan yang memfokuskan pada layanan kesehatan yang selama ini diterima oleh para hakim. Adapun hasil kajian terhadap 209 responden (hakim) di beberapa wilayah, diperoleh sebagai berikut:

1. Pelayanan fasilitas kesehatan yang diterima oleh hakim adalah layanan BPJS Kesehatan yang sama dengan masyarakat umum pengguna BPJS Kesehatan. Bagi para hakim, layanan ini seharusnya ditingkatkan dan disesuaikan dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara;
2. Mayoritas hakim merasa bahwa layanan BPJS Kesehatan yang selama ini sudah diterima belum memenuhi kebutuhan para hakim secara optimal, antara lain disebabkan karena penugasan selalu berpindah-pindah dan kondisi ini tidak diakomodir dalam sistem administrasi BPJS Kesehatan. Selain itu, pada proses dan prosedur untuk memperoleh layanan BPJS Kesehatan dinilai masih panjang dan berbelit-belit sehingga memakan waktu lama serta fasilitas pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih seadanya.
3. Harapan yang disampaikan para hakim terhadap layanan BPJS Kesehatan yaitu:
 - a. Layanan kesehatan bagi hakim ditingkatkan sesuai layanan kesehatan bagi pejabat negara dan dapat digunakan di seluruh rumah sakit
 - b. Kemudahan dalam memperoleh layanan kesehatan.

Berdasarkan kajian diatas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pembedaan layanan BPJS Kesehatan yang diberikan bagi hakim dan masyarakat bagi hakim dan masyarakat umum. Hal ini sebagai manifestasi dari pemenuhan hak-hak hakim sesuai ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan hakim adalah pejabat negara dan ketentuan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung yang mencantumkan jaminan kesehatan sebagai salah satu hak yang diperoleh hakim;
2. Perlu peningkatan layanan kesehatan bagi hakim agar dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan para hakim secara optimal, sehingga layanan BPJS Kesehatan mampu mengakomodir penugasan hakim yang selalu berpindah-pindah, memastikan proses dan prosedur untuk memperoleh layanan BPJS Kesehatan bagi hakim dengan memberikan layanan, fasilitas pengobatan serta perawatan yang berkualitas.
3. Perlu melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi mengenai layanan BPJS Kesehatan bagi hakim terkait fasilitas-fasilitas yang bisa diperoleh oleh hakim, khususnya hakim yang bertugas di daerah.⁹⁰

⁹⁰ Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI Tahun 2017

BAB IV

ANALISA DATA

A. Peran Komisi Yudisial dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim

Kedudukan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945 disamakan dengan lembaga-lembaga lain yang diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Komisi ini ditentukan dan diatur tersendiri oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena dianggap mempunyai kedudukan dan posisi yang penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Peningkatan kapasitas hakim merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan hakim yang mempunyai kapasitas pengetahuan hukum dan komitmen untuk menjaga dan menegakkan KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas meningkatkan kapasitas hakim. Peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial diharapkan dapat melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hakim yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan tersebut bersifat imperatif dan menjadi tanggung Komisi Yudisial yang selain tugas-tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim dilakukan secara bertahap, sistematis, terarah dan terukur, demi mencapai visi dan misi Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dilakukan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun

Hakim sebagai sebuah profesi memiliki Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang wajib ditaati oleh setiap orang yang berprofesi sebagai hakim. Pelatihan KEPPH merupakan pelatihan yang bertujuan:

- a. Menitik beratkan pada ranah afektif yang berhubungan dengan sikap/ perilaku;
- b. Adanya perubahan tingkah laku kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta pelatihan;
- c. Memahami dan menerima hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim;
- d. Memberikan alasan dan membuat pilihan mengapa nilai dalam KEPPH lebih penting dibandingkan nilai yang lain.

2. Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8 – 15 Tahun

Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun dirancang untuk meningkatkan integritas dan mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam satu filsafat yang utuh. Program kegiatan bertujuan menitikberatkan pada:

- a. Adanya perubahan tingkah laku/kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta pelatihan.

- b. Berperilaku dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH.
- c. Mengintegrasikan dan merumuskan filsafat kehidupan professional yang didasari KEPPH.

Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim lebih dipertegas dalam ketentuan baru ini, dalam Pasal 20 ayat (1) Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Pasal 32 A

1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Pengawasan eksternal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
4. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan ini Komisi Yudisial hanya menjalankan fungsi pengawasan eksternal sedangkan Mahkamah Agung menjalankan pengawasan internal terhadap badan peradilan dibawahnya, meskipun samasama mengawasi, Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), sedangkan Mahkamah Agung bisa mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara teknis peradilan, administrasi, dan keuangan.

B. Peranan Komisi Yudisial dalam Mengupayakan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam fiqh siyasah kekuasaan dalam upaya peningkatan kapasitas hakim dipegang oleh *as-sulthah al-tasyiri'ah* yang sebagai lembaga memegang wewenang dalam membentuk Undang-Undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist, dan melalui para Ijtima para Mujtahidin dan para Ahli fatwa.

Peningkatan kapasitas hakim dalam Islam tidaklah lepas dari Pengawasan hakim yaitu tentang peran *Al-Hisbah* dan *Qadhi Al-Qudat* yang disertai urusan

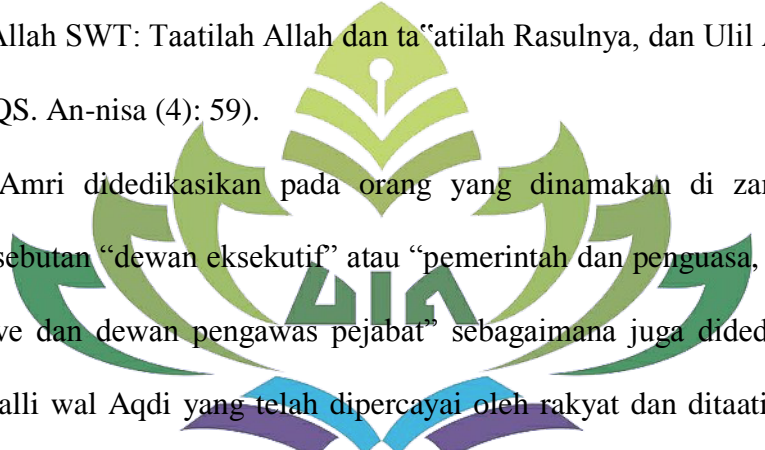
peradilan, dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan.

Hal ini dapat dilihat zaman nabi dan khulafa Arrasyidin/Khalifah, para Qadi diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing, para Qadi berdiri sendiri sehingga tidak ada hubungan administrasi antara satu Qadi dengan Qadi lain, tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim di daerah dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan status yang sama pula dihadapan khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibu kota Negara, hal ini terus berlangsung dimulai dari masa Nabi hingga akhirnya sampai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, namun pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbas khususnya ketika dipimpin oleh Harun Al-Rasyid, ia mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan mampu untuk diserahi urusan peradilan dan dialah wakil kepala negara untuk mengangkat hakim-hakim di daerah, dimana inilah timbul satu jabatan yaitu Qadhi Al-Qudat.

Mereka diangkat oleh khilafah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan, Qadhi Al-Qudat selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. Qadhi Al-Qudat juga memberikan pengawasan kepada para hakim, sekilas peran ini sama dengan Komisi Yudisial pada saat ini, tugas dan wewenang dalam pengawasan hakim sangatlah luas, hal ini dapat dilihat dari wewenangnya Qadhi Al-Qudat sebagai

lembaga pengawas yang berwenang untuk memberhentikan pejabat kehakiman yang melanggar kode etik profesi.

Islam mewajibkan penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-pekerjaan umum, bila Al-qur'an dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan Ahlul Halli wal Aqdi atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-qur'an ada dalam mereka yang disebut dengan "Ulil Amri" dalam firman Allah SWT: Taatilah Allah dan ta'atilah Rasulnya, dan Ulil Amri di antara kamu. (QS. An-nisa (4): 59).



Ulil Amri didedikasikan pada orang yang dinamakan di zaman sekarang dengan sebutan "dewan eksekutif" atau "pemerintah dan penguasa, dan Ulil Amri legislative dan dewan pengawas pejabat" sebagaimana juga didedikasikan pada Ahlul Halli wal Aqdi yang telah dipercayai oleh rakyat dan ditaati dalam segala keputusan yang diputuskan dengan musyawarah, dari keputusan undang-undang sipil dan politik. Mereka ini juga disebut dengan Ulil Amri. Ulil Amri yang bertindak sebagai wakil kekuasaan rakyat.

Dapat diketahui bahwa kebaikan umat ini dan keutamaannya dari umat-umat yang lain adalah dengan adanya perkara berikut : menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, serta beriman kepada Allah, dengan demikian dapat dipahami bahwa Ulil Amri adalah setiap orang yang memiliki otoritas dan keahlian yang menyangkut kepentingan orang banyak, sebutan Ulil Amri bisa di sebut dewan legislatif maupun eksekutif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang dihasilkan dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “ **Peran Komisi Yudisial Dalam Peningkatan Kapasitas Hakim Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**” maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Komisi Yudisial dalam mengupayakan peningkatan kapasitas hakim yaitu seperti Program Pendidikan Calon Hakim (PPC), Program Pendidikan hakim Berkelanjutan (CJE), beasiswa sekolah dan diklat kekhususan atau sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan, menyelenggarakan pelatihan KEPPH, pelatihan tematik, pelatihan khusus, menyelenggarakan Form yudisial, menyediakan bahan bacaan terhadap hakim, dan menyediakan situs hakim.
2. Komisi Yudisial dari aspek Fiqh Siyasah dapat disamakan dengan Qadhi al-Qudhah yaitu suatu organisasi kehakiman, jika dilihat pada masa dinasti Abbasiyah lembaga al-hisbah dan Qadhi al-Qudat mereka adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi hakim, sama seperti lembaga Komisi Yudisial.

B. Saran-Saran

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang merupakan lembaga yang penting demi meningkatkan semua kapasitas hakim, yang perlu disimak para calon hakim sebelum diterima menjadi hakim harus melalui syarat-syarat yang

diberikan oleh Komisi Yudisial, sehingga para hakim menjadi hakim yang bermutu, adil dalam menjalankan tugas dan terhindar dari penyelewengan hakim, dan bersih dari mafia hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004 Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam*
- Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 2012 (Jakarta:PT Raja Grafindo.),
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian dan Hukum*, 2006 Jakarta: Balai Pustaka
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006 Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asadullah al-faruq', *Hukum Acara Peradilan Islam* 2009 (Jakarta:Pustaka Yustisia,)
- Bambang widjajanto, "*Komisi Yudisial : check and balance dan Urgensi Kewenangan Pengawasan*", Bunga Rampai Refleksi 1 Tahun KYRI, 2010
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Jakarta : Balai Pustaka,
- Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim (Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013)
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* 2001 (Semarang:Pt Pustaka Rezki Putra), cet. Ke-2
- Jimly Asshiddiqie, "*Kata Pengantar*" dalam buku A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* Jakarta: ELSAM 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, 2003 Jakarta, Yarsif Watampone
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, 2006 Jakarta: LP3ES,

Muh. Busyroh Muqoddas dkk, *Laporan akhir pimpinan dan anggota komisi yudisial periode 2005-2010*

Munawir Sajali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI press, 1991

Pasal 22 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Perspektif Fiqh Siyasah, 2012, Jakarta: Sinar Grafika

Rahmat Trijono, *kamus hukum*, 2016, Jakarta : Pustaka Kenang

Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, 2000
Bandung: Taruna Grafika

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum*, 1983
(Jakarta:)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1985
Jakarta: Rajawali Pers

Wildan Suyuthi Mustofa, *“Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim*,
2013, Jakarta : Kencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004

Pasal 1 ayat (1) dan 2 UU No. 22 Tahun 2004 *Tentang Komisi Yudisial*

Pasal 1 ayat (3) jo pasal 281 ayat (5) UUD 1945

Agus Hermanto, *“Konsep Maslahat dalam Menyakapi Masalah Kontemporer (Studi
Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)* Jurnal Al-‘Adalah Vol. 1 Nomor 15 (2018)

Bertin, *“ Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap perilaku Hakim di
hubungan dengan indenpendensi hakim sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman”*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, (2013)

Nurul Chotidjah, *“Eksistensi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka”* Januari 2019

Lintong O. Siahaan, *” KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA KONTROL TERHADAP
HAKIM”* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 2 (2016)

Muhammad Fauzan, *“EKSISTENSI KOMISI YUDISAL DALAM STRUKTUR
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN YANG SEHARUSNYA*

DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN". Jurnal Ilmu
Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1 (2016)

<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2012/04/gaji-hakim-dan-gaji-pns/>, diakses pada
10 november 2018

www.Komisi Yudisial.Com, diakses 10 November 2018

